

BAB VII

PENUTUP

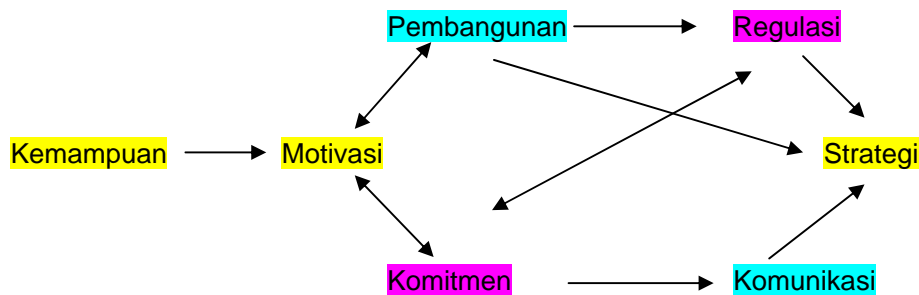
7.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan “*big picture*” dari proses persiapan penerbitan obligasi daerah dan proses institusionalisasi (pelembagaan) obligasi daerah di Provinsi Jawa Barat. Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian dikarenakan sudah menyampaikan usulan penerbitan obligasi daerah kepada Kementerian Keuangan dan telah memenuhi beberapa persyaratan administrasi.

“*Big Picture*” dari proses persiapan penerbitan obligasi daerah ini, secara garis besar terbagi terbagi atas persyaratan yang berkaitan dengan keuangan dan persyaratan yang tidak berkaitan dengan keuangan. Persyaratan Keuangan terdiri atas ; (1) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya, (2) memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (*DSCR*) yang ditetapkan oleh Pemerintah, (3) Audit terakhir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (*WDP*) atau Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP*). Untuk persyaratan keuangan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi semua persyaratan tersebut. Sedangkan Persyaratan Non Keuangan, terdiri atas ; (1) pembentukan tim persiapan penerbitan obligasi daerah; (2) penentuan kegiatan yang akan dibiayai dari obligasi daerah; (3) membuat kerangka acuan kegiatan; (4) persetujuan prinsip DPRD; (5) struktur organisasi, perangkat kerja dan SDM. Syarat yang belum terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada saat

mengajukan izin penerbitan obligasi daerah kepada Kementerian Keuangan ialah Persetujuan prinsip DPRD yang ada, ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan struktur organisasi perangkat kerja sudah ditetapkan namun belum lengkap karena tidak adanya Unit Pengelola Obligasi Daerah.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, terdapat 7 (tujuh) kategori persiapan penerbitan obligasi daerah, yakni; (1) Kemampuan, (2) Motivasi, (3) Pembangunan, (4) Komitmen, (5) Regulasi, (6) Komunikasi dan (7) Strategi. Dari ketujuh kategori tersebut diperoleh suatu pola konseptual perencanaan penerbitan obligasi daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



Proses perencanaan penerbitan obligasi daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan karena adanya motivasi sebagai pendorong proses penerbitan dengan terlebih dahulu melihat kemampuan keuangan daerahnya, karena tanpa melihat kemampuan daerah tidak akan dapat berproses ke kategori selanjutnya. Proses penerbitan dilakukan untuk pembangunan dan didukung dengan adanya komitmen dari pimpinan. Proses penerbitan obligasi daerah ini harus mengacu pula kepada regulasi tentang tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah termasuk komitmen kepala daerah dan ketua DPRD untuk menuangkannya dalam regulasi (Perda), sehingga terdapat hubungan timbal balik. Proses ini memerlukan komunikasi terhadap banyak pihak. Ketika terjadi kendala dalam proses penerbitan obligasi daerah, maka diperlukan strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan kendala tersebut.

Dari proses institusionalisasi penerbitan obligasi daerah, seperti yang dikemukakan oleh DiMaggio & Powell (1983) mengenai tiga bentuk *institutional isomorphism forces* yang mungkin dialami oleh organisasi. Pada penelitian ini terdapat tiga sumber dan mekanisme tekanan institusional dalam proses implementasi Obligasi Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini :

Sumber Utama dan Tekanan Institusional

Tipe	Sumber Utama	Tingkat kekuatan
<i>Coercive</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan-peraturan terkait implementasi Obligasi Daerah • Arahan Presiden • Perda 	Kuat
<i>Mimetic</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Study Banding DJPU-Kemenkeu 	Lemah
<i>Normative</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan dan jurusan tertentu • Sertifikasi diklat/pelatihan keahlian tertentu • Pelibatan profesional/praktisi 	Kuat

Terdapat 2 (dua) indikasi tingkatan tekanan institusional yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni kuat dan lemah. Indikasi kuat dengan arti tekanan institusionalnya memiliki efek yang jelas dan berkesinambungan pada organisasi. Tekanan dengan indikasi kuat ini terjadi pada *coercive isomorphism* dan *normative isomorphism*. Sedangkan indikasi tekanan lemah berarti hampir tidak ditemukannya efek dari tekanan institusional.

DiMaggio and Powel (1983) mengatakan bahwa negara ataupun organisasi yang mempunyai kekuasaan yang lebih besar dapat membuat tekanan formal maupun informal yang disebut sebagai *coercive isomorphism*. Bentuk tekanan paling umum dari tekanan *coercive* adalah hukum dan peraturan. Dalam hal ini

tekanan tersebut berupa peraturan pemerintah tentang pinjaman daerah, peraturan menteri keuangan, peraturan otoritas jasa keuangan, arahan presiden baik saat meninjau langsung proyek maupun sebagaimana tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.1 Tahun 2014 merupakan *coercive forces* terkuat dalam proses implementasi Obligasi Daerah ini. Begitu pula dengan *normative forces*, yakni pelibatan profesional dan praktisi, adanya sertifikasi keahlian tertentu dan prasyarat kualifikasi pendidikan tertentu menjadikannya tekanan yang kuat pula. Dan *mimetic isomorphism* walaupun telah melakukan studi banding ke Kemenkeu, namun proses *mimetic* ini bukanlah proses yang meniru secara keseluruhan, sehingga hal tersebut menjadi faktor pendorong yang lemah.

7.2 Keterbatasan Penelitian

1. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian sejenis sampai saat ini belum banyak dilakukan di Indonesia, mengingat sampai saat ini belum terdapat pemerintah daerah yang sudah menerbitkan obligasi daerah, sehingga peneliti kesulitan membuat daftar pertanyaan pada awal mulanya.
2. Penelitian ini belum melibatkan DPRD sebagai wakil legislator, sehingga penulis tidak dapat memunculkan persepsi dari pihak DPRD selaku wakil rakyat Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan anggota DPRD sedang dalam masa reses anggota dewan ketika penelitian dilaksanakan.
3. Beberapa dokumen seperti kajian analisis ekonomi dan finansial tidak dapat penulis dapatkan, karena dokumen tersebut hanya untuk kalangan internal saja, sehingga penulis tidak dapat menyajikan perhitungan ulang analisis ekonominya dari sudut pandang penulis, hanya analisis *DSCR* saja.

4. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, penulis juga tidak dapat melakukan pembahasan analisis sosial. Analisis sosial ini diperlukan agar dapat memberikan gambaran lengkap situasi sosial dan kebutuhan riil masyarakat.
5. Beberapa informan menolak untuk direkam dengan alasan penerbitan obligasi daerah ini belumlah final masih dalam proses saja, sehingga beberapa informasi yang disampaikan hanya berdasarkan perpektif peneliti saja, bukan melalui kutipan langsung informan.

7.3 Saran

1. Perlunya dibentuk pula tim koordinasi yang terdapat para pemangku kebijakan didalam tim tersebut, pelaksanaan pengambilan keputusan dapat lebih cepat dilakukan dan koordinasi antara instansi pemerintah pusat menjadi lebih mudah dilaksanakan nantinya.
2. Tim Penerbitan Obligasi Daerah harus lebih cermat lagi dalam proses implementasi ini, sehingga tidak ditemukan lagi adanya kesalahan persepsi antara anggota dewan dan pihak eksekutif kedepanya.
3. Sarana dan prasarana pendukung untuk unit pengelola obligasi daerah perlu disiapkan terlebih dahulu agar memudahkan proses administrasi dalam penerbitan obligasi daerah nantinya. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM juga diperlukan merujuk kepada *background* pendidikan dan sertifikasi keahlian tertentu sesuai yang dipersyaratkan dalam PMK tentang penerbitan obligasi daerah.
4. Penelitian selanjutnya agar dapat melaksanakan perbandingan penerbitan obligasi daerah dengan instansi yang serupa jika nantinya terdapat pemerintah daerah lain yang sudah pernah melaksanakan penerbitan obligasi daerah.

5. Penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan pembahasan analisis sosial sehingga didapatkan gambaran yang konkrit dan riil atas kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
6. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggali informasi pula pada Anggota DPRD yang juga terlibat dalam proses penerbitan obligasi daerah ini, sehingga dapat dimunculkan persepsi dari dua belah pihak yaitu pihak eksekutif dan legislatif.